

STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DI INDONESIA

Bambang Agus Windusancono
Agus_windoe@yahoo.co.id
Dosen Fisip Untag Semarang Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Semarang,

Abstract

Regional development is generally associated with decentralization. That relate to the allocation of budgets under government authority to lower levels of government for : spending, collecting taxes, electing regional of head and providing assistance from the government. Decentralization includes political issue, administrative and fiscal aspects. Based on data it shows that financial autonomy has a positive effect on economic growth, and also effect on percapita income. The problem of decentralization are gaps each regional development and economic disparities in the population. So that regional development strategy is needed with efforts to develop the local economy of each region that focuses on improving the quality of life and the ability of human resources in self and regional development.

Key Word: Regional development, economic policy, distribution, investment

Abstrak

Pembangunan daerah pada umumnya dikaitkan dengan desentralisasi yang berhubungan dengan alokasi anggaran secara wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah di bawahnya untuk melakukan pembelanjaan, memungut pajak, memilih Kepala Daerah dan adanya bantuan dari pemerintah pusat. Umumnya desentralisasi mencakup aspek politik, administratif dan fiskal. Berdasarkan data nasional menunjukkan bahwa otonomi keuangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pengaruh positif dari pendapatan perkapita. Permasalahan desentralisasi muncul dengan masih adanya kesenjangan pemerataan pembangunan daerah, dan kesenjangan ekonomi penduduk, sehingga diperlukan strategi pemerataan pembangunan daerah dengan upaya pengembangan ekonomi lokal setiap daerah yang menitik beratkan pada peningkatan kualitas hidup dan kemampuan sumber daya manusia dalam pengembangan diri dan wilayah.

Kata Kunci : Pembangunan Daerah, Kebijakan Ekonomi, Distribusi, investasi

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan daerah dan meningkatkan keserasian pembangunan sektor regional dan pertumbuhan antar daerah serta partisipasi daerah dalam pembangunan serta dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Otonomi daerah, terjadi pergeseran pola dalam pembangunan daerah yang dulu bersifat sentralisasi (terpusat), menjadi desentralisasi.

Desentralisasi dalam arti meningkatkan keleluasaan kepada daerah untuk membangun wilayahnya sesuai dengan kebijakan lokal termasuk didalamnya seluruh sektor termasuk pembangunan bidang perekonomian. Konsep pembangunan daerah umumnya bermakna praktis (utilitarian), dimana pembangunan daerah dianggap mampu secara efektif mengelola sumber daya Manusia, Sumber dana dan kemampuan mengelola permasalahan pembangunan di daerah. Wujud desentralisasi ini berupa pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada tingkat pemerintahan dibawahnya untuk melakukan pembelanjaan, memungut pajak, terbentuknya dewan yang dipilih rakyat, memilih kepala daerah oleh rakyat dan adanya bantuan (transfer) dari pemerintah pusat. Umumnya desentralisasi mencakup aspek politik, administratif dan fiskal (Abimanyu dan Megantara, 2009).

Sesuai Miriam Budiardjo (2003) menjelaskan pemerintah pusat mempunyai wewenang menyerahkan sebagian kekuasaannya ke daerah berdasarkan hak otonomi.

Penyerahan sebagian kekuasaan itu karena Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Namun tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap ditangan pemerintah pusat. Dengan demikian Pembangunan daerah melalui mekanisme pengambilan keputusan otonomi diyakini mampu merespons permasalahan aktual yang akan sering muncul dalam keadaan masih tingginya intensitas alokasi sumber daya alam dalam pembangunan daerah dengan masih dalam pembinaan pemerintah pusat.

Otonomi dalam administrasi pembangunan ini dirasakan makin relevan sejalan dengan keragaman sosial dan ekologi (bio-social diversity) pada suatu wilayah. Pengertian dan penerapan pembangunan daerah umumnya dikaitkan dengan kebijakan ekonomi atau keputusan politik yang berhubungan dengan alokasi secara spasial dari kebijakan pembangunan nasional secara keseluruhan, dengan demikian, kesepakatan-kesepakatan nasional menyangkut sistem politik dan pemerintahan, atau aturan mendasar lainnya, menentukan pengertian dari pembangunan daerah itu sendiri.

Atas dasar alasan itulah pandangan terhadap pembangunan daerah dari setiap negara akan sangat beragam diantaranya Malaysia, Thailand, Singapura, atau negara yang berukuran kecil sangat mungkin tidak mengenal istilah pembangunan daerah. Sebaliknya bagi negara besar, seperti Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau dan provinsi bahkan wilayah Kabupaten dan Kota perlu menetapkan definisi-definisi pembangunan daerah yang rinci untuk mengimplementasikan pembangunan yang merata, adil dan beradab, sesuai dengan Pancasila sebagai dasar Negara.

Implementasi pembangunan daerah berdasar UU No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, terbukti sangat mendukung keberhasilan pembangunan nasional hingga Pelita VI tetapi juga mampu secara langsung melegitimasi kepemimpinan Presiden Suharto. Namun sesuai dengan Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah masih bersifat umum terhadap kebijakan desentralisasi. Sehingga pelaksanaan UU No 32 tahun 2004 permasalahan yang muncul harus segera dibenahi demi kesesuaian pemahaman terhadap undang-undang dengan regulasi yang terkait. Untuk dapat mengevaluasi efektivitas regulasi tersebut, maka perlu dilakukan pemetaan terhadap regulasi sektoral dan desentralisasi sebagai landasan kebijakan pelaksanaan otonomi daerah agar isu dan permasalahan daerah yang berkembang selaras dengan penyelesaian dari pembina atau pusat diselesaikan sesuai

dengan tupoksi masing-masing dengan tetap memperhatikan aspirasi di daerah.

Esensi desentralisasi adalah memberikan otonomi bagi daerah dalam rangka mendekatkan pelayanan bagi masyarakat. Dengan demikian, desentralisasi merupakan sarana pemerintah pusat untuk melayani kebutuhan masyarakat agar lebih efektif dan efisien dengan cara berbagi tugas dengan gubernur, bupati, dan walikota. Hal ini karena stakeholders proses desentralisasi dan otonomi daerah tidak hanya pemerintah pusat. Stakeholders terbesar justru adalah daerah, dan penerima benefit akhirnya adalah seluruh masyarakat Indonesia

Pemberian desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas sektor publik dengan mencari alternatif terbaik dari sumber pembiayaan pembangunan disamping bantuan dari pemerintah pusat. Dan meningkatkan investasi swasta dan aspirasi masyarakat. Dalam menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk peran serta dalam pembangunan daerah.

B. Permasalahan

Permasalahan yang diangkat di dalam makalah ini adalah:

1. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah
2. Pembangunan Daerah
3. Strategi pembangunan ekonomi daerah

C. Pembahasan

1. Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya penambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu daerah dan negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu daerah atau Negara. Pembangunan ekonomi daerah tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*); pembangunan ekonomi daerah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi daerah akan memperlancar proses pembangunan ekonomi nasional. Untuk mendukung dan mempercepat pencapaian tujuan nasional, maka kebijakan makro ekonomi harus dilakukan melalui harmonisasi arah kebijakan fiskal, moneter, sektor riil maupun neraca pembayaran. Untuk mewujudkan kebijakan makro yang sehat perlu didukung oleh kebijakan keuangan daerah yang sejalan dengan kebijakan fiskal nasional. Selain dana transfer ke daerah, pemerintah pusat juga mengalokasikan sebagian besar belanja untuk mendanai urusan pusat di daerah dan pelayanan kepada masyarakat, antara lain melalui subsidi, dana dekonsentrasi dan tugas

pembantuan, bantuan masyarakat melalui PNPM dan Jamkesmas, hibah, dll. Apabila dihitung secara keseluruhan, maka dana yang mengalir ke daerah telah mencapai kisaran 60% dari belanja negara. Sehingga pertumbuhan ekonomi daerah bisa lebih cepat dan merata. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi daerah adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan Pendapatan daerah atau Nasional Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi daerah keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan daerah, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya penambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial dan teknik.

Selanjutnya pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Hal ini sesuai dengan tujuan desentralisasi yang bersifat

politik dan administrasi. Bryant & White Desentralisasi administrative biasanya disebut dekonsentrasi, yang berarti delegasi wewenang pelaksanaan kepada tingkat-tingkat lokal. Desentralisasi politik atau devolusi berarti wewenang pembuatan keputusan dan kontrol tertentu terhadap sumber-sumber daya diberikan pada pejabat-pejabat regional dan lokal. Dalam devolusi, yang didesentralisasikan adalah wewenang mengambil keputusan politik dan administrasi (Joko Widodo, hal.40). Sejalan dengan hal tersebut pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal, dan mampu melakukan perencanaan strategik keuangan daerah secara nyata, dinamis dan bertanggungjawab. Untuk memastikan pengelolaan dana publik secara transparan dengan perlu adanya evaluasi secara rutin dari auditor yang independen.

Evaluasi keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dalam adanya perubahan masyarakat sebagai dampak langsung yang terjadi akibat suatu kebijakan. Hal itu sesuai dari laporan kajian otonomi daerah tahun 2010 yang intinya ada 5 faktor penyebab kebijakan otonomi daerah belum mencapai hasil antara lain:

- a. adanya keterbatasan dana yang mengakibatkan program gagal;
- b. kesalahan administrasi yang dapat ditunjukkan dengan isi kebijakan, walaupun isi kebijakan sangat

baik, tetapi jika administrasi tersebut buruk, maka implementasi dari kebijakan tersebut akan mengalami kesulitan;

- c. kurang komprehensifnya pertimbangan kebijakan, karena hanya memperhatikan beberapa faktor tertentu;
 - d. kebijakan publik yang bertentangan dengan kebijakan yang lain;
 - e. adanya usaha untuk memecahkan masalah yang cukup besar dengan sumber yang lebih kecil daripada bobot masalah itu sendiri.
2. Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah

- a. Teori strategi pembangunan ekonomi daerah

Strategi Penataan Kembali Indonesia yang diarahkan untuk menyelamatkan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan semangat, jiwa, nilai, dan konsensus dasar yang melandasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila; Undang-Undang Dasar 1945 (terutama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945) ; tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tetap berkembangnya pluralisme dan keberagaman dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika.

Strategi Pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia di segala bidang yang merupakan

perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Paradigma Pembangunan untuk semua dalam konteks Indonesia, menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hanya dapat dilakukan dengan menerapkan enam strategi dasar pembangunan.

1. Menerapkan strategi pembangunan yang inklusif, yang menjamin pemerataan dan keadilan, serta mampu menghormati dan menjaga keberagaman rakyat Indonesia, "Dalam kerangka pembangunan yang inklusif ini, pemerintah telah menjalankan berbagai macam kebijakan. Di antaranya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri," ujarnya.
2. Pembangunan Indonesia haruslah berdimensi kewilayahan.
3. Menciptakan integrasi ekonomi nasional dalam era globalisasi.
4. Pengembangan ekonomi lokal di setiap daerah, guna membangun ekonomi domestik yang kuat secara nasional.
5. Adanya keserasian antara pertumbuhan dan pemerataan, atau Growth with Equity. Oleh sebab itu, pemerintah menerapkan Program Keluarga Harapan (PKH), ,

BLT, Jamkesmas, BOS, dan Kredit Usaha Kecil (KUR). "Strategi demikian juga merupakan koreksi atas kebijakan pembangunan terdahulu, yang dikenal dengan trickle down effect," ujarnya.

6. Adapun strategi yang terakhir adalah pembangunan yang menitik-beratkan pada kemajuan kualitas manusianya. Manusia Indonesia bukan sekedar obyek pembangunan, melainkan justru subyek pembangunan. Sumber daya manusia menjadi aktor dan sekaligus fokus tujuan pembangunan, sehingga dapat dibangun kualitas kehidupan manusia Indonesia yang makin baik
- b. Macam-macam Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah

Salah satu konsep penting yang perlu diperhatikan dalam mempelajari perekonomian suatu Negara adalah mengetahui tentang strategi pembangunan ekonomi. Strategi pembangunan ekonomi diberi batasan sebagai suatu tindakan pemilihan atas faktor-faktor (variable) yang akan dijadikan faktor/variable utama yang menjadi penentu jalannya proses pertumbuhan (suroso, 1993). Beberapa strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat disampaikan adalah :

1. Strategi pertumbuhan
Inti dari konsep ini adalah :
 - a. Strategi pembangunan ekonomi suatu Negara akan terpusat pada upaya

- pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah, dan memusat, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi.
- b. Selanjutnya bahwa pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat ke bawah (trickle-down-effect) pendistribusian kembali.
 - c. Jika terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan, hal tersebut merupakan persyaratan terciptanya pertumbuhan ekonomi.
 - d. Kritik paling keras dari strategi yang pertama ini adalah, bahwa pada kenyataannya yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam.
2. Strategi pembangunan dengan pemerataan
- Inti dari konsep ini adalah, dengan dititikberatkan pada peningkatan pembangunan melalui teknik social engineering, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk, dan program terpadu. Keadaan sosial antara si kaya dan si miskin mendorong para ilmuwan untuk mencari alternatif. Alternatif baru yang muncul adalah strategi pembangunan pemerataan. Strategi ini dikemukakan oleh Ilma Aldeman dan Morris. Yang menonjol pada pertumbuhan

pemerataan ini adalah ditekannya peningkatan pembangunan melalui teknik social engineering, seperti melalui penyusunan rencana induk, paket program terpadu.

Dengan kata lain, pembangunan masih diselenggarakan atas dasar persepsi, instrumen yang ditentukan dari dan oleh mereka yang berada "diatas" (Ismid Hadad, 1980). Namun ternyata model pertumbuhan pemerataan ini juga belum mampu memecahkan masalah pokok yang dihadapi negara-negara sedang berkembang seperti pengangguran masal, kemiskinan struktural dan kepincangan sosial. Berikut adalah contoh kasus strategi pemerataan pembangunan yang terjadi di Provinsi Jawa tengah :

Tak dapat dipungkiri, kondisi geografis suatu daerah mempunyai peranan penting dalam kemajuan pembangunan. Daerah yang berada di wilayah strategis sangat signifikan dalam mempercepat dan meningkatkan pembangunan ekonomi. Sebagai contoh, Provinsi Jawa Tengah yang secara geografis bisa dibagi dalam dua wilayah pembangunan, yaitu utara dan selatan. Bagian utara meliputi sepanjang wilayah pantura di Jawa Tengah meliputi Kabupaten Brebes sampai ke Kabupaten Rembang. Sedangkan

bagian selatan meliputi wilayah Kabupaten Banyumas, dan sekitarnya, Kota Surakarta dan sekitarnya serta Kabupaten Magelang dan sekitarnya

Daerah bagian selatan relatif tertinggal dibandingkan daerah bagian utara. Kondisi tersebut disebabkan oleh geografi-strategis daerah bagian utara yang sangat dekat dengan kota metropolitan dan perdagangan. Oleh karena itu, ketimpangan yang terjadi antara utara-selatan harus segera diatasi, salah satunya, melalui strategi pembangunan jangka panjang dengan memaksimalkan potensi daerah tertinggal. Saat ini, strategi yang tengah dikembangkan, antara lain, dengan menjadikan daerah bagian selatan sebagai kawasan wisata dan pertanian, perikanan Konsep utamanya adalah pembangunan pariwisata dan pertanian dan perikanan yang berbasis kawasan dengan keterpaduan lintas sektor untuk peningkatan taraf hidup masyarakat. Sedangkan prinsipnya adalah pengembangan kewilayahan yang efektif, efisien disertai dukungan lintas sektor.

Proyek pengembangan kawasan pariwisata dan pertanian dan perikanan di wilayah selatan ini akan menjadi percontohan nasional bagi sektor pariwisata dan pertanian. Karena itu, proyek ini perlu dikawal oleh seluruh

elemen masyarakat supaya proyek ini berhasil. Pengembangan kawasan pariwisata dan pertanian harus menjadi prioritas utama yang dikerjakan sungguh-sungguh di masing-masing pemerintah daerah. Dukungan dan kerja sama semua pihak sangat dibutuhkan untuk menyukseskan program strategis ini, sehingga kesenjangan pembangunan dapat teratasi.

Hal ini sesuai dengan dimensi desentralisasi antara lain

- a) Efektivitas dalam menyediakan effectiveness-providing minimum standards of service delivery cost-effectively, and targeted toward disadvantaged groups;
- b) the responsiveness of decentralized institutions to the demands of local communities, at the same time as meeting the aims of broader public policy; and
- c) sustainability as indicated by political stability, fiscal adequacy and institutional flexibility.

3. Strategi Ketergantungan

Tidak sempurnanya konsep strategi pertama dan kedua mendorong para ahli ekonomi mencari alternatif lain, sehingga muncul strategi pembangunan dengan nama strategi ketergantungan adalah :

a) Jika suatu Negara ingin terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi, Negara tersebut harus mengarahkan upaya pembangunan ekonominya pada usah melepaskan ketergantungan dari pihak lain. Langkah yang dapat ditempuh diantaranya adalah; meningkatkan produksi nasional yang disertai dengan peningkatan kemampuan dalam bidang produksi, lebih mencintai produk nasional, maupun produk daerah dan sejenisnya.

b) Teori ketergantungan ini kemudian dikritik oleh Kathari dengan mengatakan "...sebab selalu akan gampang sekali bagi kita untuk menumpahkan semua kesalahan pada pihak luar yang memeras, sementara pemerasan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat kita sendiri dibiarkan saja..." (Kathari dalam Ismid Hadad, 1980).

4. Strategi yang berwawasan ruang

Strategi ini dikemukakan oleh Myedall dan Hirschman, yang mengemukakan sebab-sebab kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah yang lebih kaya/maju. dikarenakan kemampuan/ pengaruh menyebar dari kaya ke miskin (spread effects) lebih kecil dari pada

terjadinya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya (back-wash-effects). Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah, bahwa Mydrall tidak percaya bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai. Sedangkan Hirscham percaya, sekalipun baru akan tercapai dalam jangka panjang.

5. Strategi pendekatan kebutuhan pokok

Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan yang harus benar – benar dipenuhi, seperti sandang, pangan, dan papan. Dalam hal pembangunan Indonesia masih sangat rendah terutama pada sektor pemenuhan kebutuhan pokok, Indonesia masih jauh dari kata terpenuhi. Masih banyak masyarakat Indonesia yang kebutuhan pokoknya belum terpenuhi. Maka dari itu dilakukan suatu strategi untuk menanggulangnya, yaitu strategi pendekatan kebutuhan pokok. Sasaran dalam strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara masal. Menghapus kemiskinan di indonesia mungkin hal yang sangat sulit untuk diwujudkan tapi setidaknya mengurangi kemiskinan dapat diupayakan. Penanggulangan kemiskinan bisa diupayakan dengan cara – cara berikut antara lain:

a) Kurangi korupsi, mengurangi korupsi mungkin lebih mudah

- daripada memberantas korupsi secara keseluruhan. Setidaknya dengan berkurangnya korupsi dapat membantu menanggulangi kemiskinan.
- b) Percayakan produk lokal dan kalo bisa dinomorsatukan, mempercayai dan menggunakan produk lokal atau dalam negeri lebih baik daripada menggunakan produk luar karena dapat membantu Negara ini sendiri agar semakin berkembang.
- c) Tingkatkan mutu barang, meningkatkan mutu atau kualitas dari suatu barang itu sangat penting, karena kualitas menentukan kepercayaan konsumen terhadap suatu barang.
- d) Maksimalkan pendidikan dan keterampilan, meningkatkan dan memaksimalkan pendidikan bagi masyarakat, serta mengajarkan keterampilan bagi masyarakat luas dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
- e) Jujur, sikap jujur merupakan suatu pondasi untuk memiliki hidup yang lebih baik. Jujur harus ditanamkan kepada semua orang agar tidak terjadi

hal yang dapat merugikan Negara seperti korupsi.

- f) Gigih, untuk menanggulangi kemiskinan kita harus melakukannya dengan bersungguh-sungguh agar tercapai yang kita harapkan.

Usaha Strategi selanjutnya dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Sedunia (ILO) yang menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha lebih diarahkan pada penciptaan lapangan pekerjaan bagi pengangguran, peningkatan pemenuhan kebutuhan pokok, pemberdayaan sumber daya manusia, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata dan sejenisnya.

Tujuan pemenuhan kebutuhan pokok untuk mengamankan bahwa di antara implikasi dan konsekuensi logis dari doktrin ukhuwah adalah sumber daya nikmat yang ada harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok semua individu sehingga setiap orang mendapatkan standar hidup yang manusiawi, layak dan terhormat sesuai dengan martabat manusia.

Sasaran dari strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara masal. Strategi ini selanjutnya dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Sedunia (ILO) pada tahun 1975, dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pemenuhan kebutuhan pokok, dan sejenisnya.

3. Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Sebelum orde baru strategi pembangunan di Indonesia secara teori telah diarahkan pada usaha pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun pada kenyataannya nampak adanya kecenderungan lebih menitik beratkan pada tujuan-tujuan politik, dan kurang memperhatikan pembangunan ekonomi.

Sedangkan pada awal orde baru, strategi pembangunan di Indonesia lebih diarahkan pada tindakan pembersihan dan perbaikan kondisi daerah yang mendasar, terutama usaha untuk menekankan laju yang sangat tinggi (hyper inflasi).

Dari keterangan pemerintah yang ada, dapat sedikit disimpulkan bahwa strategi pembangunan di Indonesia tidak mengenal perbedaan strategi yang ekstrem. Sebagai contoh selain

strategi pemerataan pembangunan, Indonesia-pun tidak mengesampingkan strategi pertumbuhan, dan strategi yang berwawasan ruang (terbukti dengan dibaginya wilayah Indonesia dengan berbagai wilayah pembangunan I,II, III dan seterusnya).Strategi-strategi tersebut kemudian dipertegas dengan ditetapkannya sasaran-sasaran dan titik berat setiap Repelita, yakni :

- a) Repelita I : meletakkan titik berat pada sector pertanian dan industry yang mendukung sector pertanian meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.
- b) Repelita II : meletakkan titik berat pada sector pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.
- c) Repelita III : meletakkan titik berat pada sector pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industry yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.
- d) Repelita IV : meletakkan titik berat pada sector pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industry yang dapat menghasilkan mesin-mesin industry sendiri, baik industry ringan yang akan terus dikembangkan dalam Repelita-Repelita selanjutnya

meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.

4. Pembangunan Daerah

Sebelum menjelaskan tentang pembangunan daerah, disini akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian daerah (regional) itu sendiri, karena pengertian daerah dapat berbeda-beda artinya tergantung pada sudut pandang melihatnya. Misalnya dari sudut hukum, keamanan, pemerintahan dan lain sebagainya. Namun kami dalam hal ini akan menjelaskan pengertian daerah hanya melihat dari sudut pandang ekonominya saja. Ditinjau dari sudut pandang ekonominya daerah mempunyai arti :

- a) Suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana terdapat kegiatan ekonomi dan di dalam pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama, kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan perkapita, sosial-budayanya, geografisnya dan lain sebagainya. Daerah yang memiliki ciri-ciri seperti ini disebut daerah homogen.
- b) Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang apabila daerah tersebut dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Daerah dalam pengertian ini disebut sebagai daerah modal.
- c) Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti satu provinsi, kabupaten/kota,

kecamatan, dan lain sebagainya. Daerah ini didasarkan pada pembagian administrative suatu Negara. Daerah dalam pengertian ini dinamakan daerah adminitrasi.

Lincoln Arsyad (2000) memberikan pengertian pembangunan daerah adalah “sebagai proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kementrian antara pemerintah daerah dengan sector swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut”.

Dalam pembangunan ekonomi daerah yang menjadi pokok permasalahannya adalah terletak pada kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarah pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Pembangunan daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan

produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan usaha-usaha baru.

Tujuan utama dari setiap pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah dengan partisipasi masyarakatnya, dengan dukungan sumberdaya yang ada harus mampu menghitung potensi sumber daya-sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun ekonomi daerahnya.

5. Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah

Secara umum strategi pembangunan ekonomi daerah adalah mengembangkan kesempatan kerja bagi penduduk yang ada sekarang dan upaya untuk mencapai stabilitas ekonomi, serta mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam. Pembangunan ekonomi akan berhasil bila mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya fluktuasi ekonomi sektoral, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesempatan kerja.

Lincoln Arsyad (2000) secara garis besar menggambarkan strategi pembangunan ekonomi daerah dapat dikelompokkan menjadi 4 yaitu :

- a) Strategi pengembangan fisik (locality or physical development strategy)
- b) Melalui pengembangan program perbaikan kondisi fisik/lokalisasi daerah yang ditunjukkan untuk kepentingan pembangunan industri dan perdagangan, pemerintah daerah akan berpengaruh positif bagi pembangunan dunia usaha daerah. Secara khusus, tujuan strategi pembangunan fisik ini adalah untuk menciptakan identitas masyarakat, dan memperbaiki daya tarik pusat kota (civic center) dalam upaya memperbaiki dunia usaha daerah. Untuk mencapai tujuan pembangunan fisik tersebut diperlukan alat-alat pendukung, yaitu :
 - c) Pembuatan bank tanah (land banking), dengan tujuan agar memiliki data tentang tanah yang kurang optimal penggunaannya, tanah yang belum dikembangkan, atau salah dalam penggunaannya dan lain sebagainya.
 - d) Pengendalian perencanaan dan pembangunan, dengan tujuan untuk memperbaiki iklim investasi di daerah dan memperbaiki citra pemerintah daerah.
 - e) Penataan kota (townscaping), dengan tujuan untuk memperbaiki sarana jalan, penataan pusat-pusat pertokoan, dan penetapan standar fisik suatu bangunan.

- f) Pengaturan tata ruang (zoning) dengan baik untuk merangsang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah.
- g) Penyediaan perumahan dan pemukiman yang baik akan berpengaruh positif bagi dunia usaha, disamping menciptakan lapangan kerja.
- h) Penyediaan infrastruktur seperti : sarana air bersih, taman, sarana parkir, tempat olahraga dan lain sebagainya.

Evaluasi kebijakan perlu dilakukan untuk:

- a) Mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuannya;
 - b) Mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Dengan melihat tingkat efektivitasnya, maka dapat disimpulkan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal;
 - c) Memenuhi aspek akuntabilitas publik. Dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan, maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik;
 - d) Menunjuk pada stakeholder manfaat suatu kebijakan;
 - e) Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
6. Strategi pengembangan dunia usaha (business development strategy)
- Pengembangan dunia usaha merupakan komponen penting dalam

pembangunan ekonomi daerah, karena daya tarik, kerativitas atau daya tahan kegiatan ekonomi dunia usaha, adalah merupakan cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat. Untuk mencapai tujuan pembangunan fisik tersebut diperlukan alat-alat pendukung, antara lain :

- a) Penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha, melalui pengaturan dan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi dunia usaha dan pada saat yang sama mencegah penurunan kualitas lingkungan.
- b) Pembuatan informasi terpadu yang dapat memudahkan masyarakat dan dunia usaha untuk berhubungan dengan aparat pemerintah daerah yang berkaitan dengan perijinan dan informasi rencana pembangunan ekonomi daerah.
- c) Pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil, karena usaha kecil perannya sangat penting sebagai penyerap tenaga kerja dan sebagai sumber dorongan memajukan kewirausahaan.
- d) Pembuatan system pemasaran bersama untuk menghindari skala yang tidak ekonomis dalam produksi, dan meningkatkan daya saing terhadap produk impor, seta sikap kooperatif sesamapelaku bisnis.
- e) Pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan litbang). Lembaga ini diperlukan untuk melakukan

kajian tentang pengembangan produk baru, teknologi baru, dan pencarian pasar baru.

7. Strategi pengembangan sumber daya manusia (human resource development strategy)

Strategi pengembangan sumberdaya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam proses pembangunan ekonomi, oleh karena itu pembangunan ekonomi tanpa dibarengi dengan peningkatan kualitas dan ketrampilan sumberdaya manusia adalah suatu keniscayaan. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia dapat dilakukan dengan cara :

- a) Pelatihan dengan system customized training, yaitu system pelatihan yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan dan harapan sipemberi kerja.
- b) Pembuatan bank keahlian (skill banks), sebagai bank informasi yang berisi data tentang keahlian dan latar belakang orang yang menganggur di penciptaan iklim yang mendukung bagi perkembangan lembaga-lembaga pendidikan dan keterampilan di daerah.
- c) Pengembangan lembaga pelatihan bagi para penyandang cacat.

8. Strategi pengembangan masyarakat (community based development strategy)

Strategi pengembangan masyarakat ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memberdayakan

(empowerment) suatu kelompok masyarakat tertentu pada suatu daerah. Kegiatan-kegiatan ini berkembang baik di Indonesia belakangan ini, karena ternyata kebijakan umum ekonomi yang tidak mampu memberikan manfaat bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan manfaat social, seperti misalnya dengan menciptakan proyek-proyek padat karya untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk memperoleh keuntungan dari usahanya.

D. Penutup

Pembangunan daerah di setiap wilayah maka Pemerintah Daerah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan bidang ekonomi, maka terjadi peningkatan permintaan data dan indikator-indikator yang menghendaki ketersediaan data sampai tingkat Kabupaten/Kota dan Desa. Data dan indikator-indikator pembangunan yang diperlukan adalah yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Dalam menghadapi realitas kehidupan yang menunjukkan adanya kesenjangan kesejahteraan mengakibatkan adanya pekerjaan berat kepada para ahli pembangunan termasuk di dalamnya para pembuat kebijakan. Ini dimaksudkan untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul akibat

kesenjangan kesejahteraan, perlu dilakukan upaya pembangunan yang terencana.

Upaya pembangunan yang terencana dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang dilakukan. Lebih jauh lagi berarti perencanaan yang tepat sesuai dengan kondisi di suatu wilayah menjadi syarat mutlak dilakukannya usaha pembangunan.

Perencanaan pembangunan memiliki ciri khusus yang bersifat usaha pencapaian tujuan pembangunan tertentu. Adapun ciri dimaksud antara lain:

1. Perencanaan yang isinya upaya-upaya untuk mencapai perkembangan ekonomi yang kuat dapat tercermin dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi positif.
2. Ada upaya untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.
3. Berisi upaya melakukan struktur perekonomian
4. Mempunyai tujuan meningkatkan kesempatan kerja.
5. Adanya pemerataan pembangunan.

Dimana yang dikemukakan di atas memiliki makna strategis dalam rangka mengembangkan perekonomian di daerah utamanya di pedesaan. Hal tersebut bukan saja disebabkan sumber permasalahan lebih banyak bertempat dipedesaan secara fisik, tetapi sesungguhnya pedesaan juga menyimpan nilai-nilai lokal yang perlu diberi peluang untuk berkembang memanfaatkan sumber-sumberdaya alam melalui otonomi daerah.

Itulah sebabnya menjadi penting bahwa pembangunan daerah memerlukan perencanaan dan koordinasi yang terpadu, secara vertikal maupun horizontal, untuk mengantisipasi aliran externality secara spasial maupun akumulatif. Dengan demikian, kebijakan dan program pembangunan daerah yang disusun tidak hanya dapat memberi panduan yang terarah dan efisien bagi pemecahan permasalahan tetapi lebih jauh memberi jaminan akan keberlanjutan sistem produksi perekonomiannya dalam wilayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- http://www.elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab2-perkembangan_strategi_dan_perencanaan_pembangunan_ekonomi_indonesia.pdf
- http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab2-perkembangan_strategi_dan_perencanaan_pembangunan_ekonomi_indonesia.pdf
- <http://ekonomi.kompasiana.com/agrobisnis/2011/06/13/minapolitan-strategi-pemerataan-pembangunan-banten/>
- <http://marchtavaissta.wordpress.com/2012/04/20/perkembangan-strategi-dan-perencanaan-pembangunan-ekonomi-indonesia/>
- <http://www.yohanli.com/upaya-pemerataan-pembangunan.html>
- http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab2-perkembangan_strategi_dan_perencanaan_pembangunan_ekonomi_indonesia.pdf
- Nugroho, Iwan dan Rokhimin Dahuri. 2004. Pembangunan Wilayah perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. Jakarta. LP3ES
- Drs.Subandi,M.M.2005.Sistem Ekonomi Indonesia. Alfabeta Bandung

- Depdagri Dirjen PMD, 2013, Perencanaan Partisipasi Pembangunan Masyarakat Desa, Jakarta
- Mubyarto, 2000, Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia pasca krisis ekonomi, Aditya Media, Jogjakarta
- Sekretariat Negara RI, 2017, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, Jakarta,
- Undang-undang Nomer 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ,Penerbit Setneg RI, Jakarta 2014
- <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/16/110000069/pengertian-otonomi-daerah-dan-dasar-hukumnya>